

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ashiddiqie, Jimly. 2008. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer.
- Coralie, Bryant., White, Louis, 1987. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta: LP3ES.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2000. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.
- Fauzi, Noer. 1997. *Tanah Dan Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Gunanegara. 2008. *Rakyat & Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan: Pelajaran Filsafat, Teori Ilmu dan Jurisprudensi*. Jakarta: Tatanusa.
- Marbun, SF., Moh. Mahfud. MD, 2011. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Munandar, M. 1998. *Dinamika Masyarakat Transisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- ND, Mukti Fajar., Ahmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salindeho, John. 1993. *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiharto, Umar Said. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Sugiharto, Umar Said., Suratman., Muchsin, Noorhudha. 2015. *Hukum Pengadaan Tanah Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi*. Malang: Setara Press.
- Sumardjono, Maria S.W. 2015. *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia Dari Keputusan Presiden Sampai Undang-undang*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Cetakan Kedua, Sinar Grafika

Syah, Mudakir, Iskandar, 2015. *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Bekasi: Permata Aksara.

Utrecht. 1993. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.

### **Jurnal**

Djanggih, Hardianto & Salle. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Pandecta Fakultas Hukum Unnes*. Volume 12 Nomor 2, halaman 168.

Firmansyah, Ade, Arif. (2014). Pembaharuan Substansi Hukum Pengadaan Tanah Yang Berkeadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 6 Nomor 24, halaman 334.

Koeswahyono, Imam. (2008). Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum. *Jurnal Konstitusi PPK-FH Universitas Brawijaya*. Volume 1 Nomor 1, halaman 4.

Muwahid. (2017). Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Melibatkan Pihak Swasta Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Volume 7 Nomor 1, halaman 158-159.

Wicaksono, Arditya. (2012). Potret Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Iptek Pertanahan*. Volume 2 Nomor 1, halaman 60.

Dwi, Salfutra, Reko & Armanda, Agustian, Reko. (2017). Problematika Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Kota Pangkalpinang. *Jurnal Hukum Progresif*. Volume 11 Nomor 2, halaman 1914.

Sahnan, Fathoni, Yazid, M., & Salat, Musakir. (2015). Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pembebasan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Hukum IUS Universitas Mataram*. Volume III Nomor 9, halaman 423.

Sakti, Trie. (2007). Permasalahan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Ilmiah Pusat Penelitian dan Pengembangan BPN*. Volume 8 Nomor 2, halaman 6-7.

Subekti, Rahayu. (2016). Kebijakan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Yustisia Fakultas Hukum UNS*. Volume 5 Nomor 2, halaman 383.

Zakie, Mukmin. (2011). Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia). *Jurnal Ius Quia Iustum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. Volume 18 Nomor 1, halaman 189.

Zarkasih, Hery. (2015). Pelaksanaan Prinsip Keadilan dalam Pemberian Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Hukum IUS Universitas Mataram*. Volume 3 Nomor 2, halaman 9.

### **Internet**

KBBI *Online* “Fasilitas” <https://kbbi.web.id/fasilitas> diakses pada tanggal 27 November 2018, Pukul 14.00 WIB.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia “Prasarana” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prasarana>, diakses pada tanggal 8 Desember 2018, Pukul 11.45 WIB.

Pipit Ferniza Putri, “Pengertian Sarana dan Prasarana Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia” [http://www.academia.edu/18748505/Pengertian\\_sarana\\_dan\\_prasarana\\_Menurut\\_Kamus\\_Besar\\_Bahasa\\_Indonesia](http://www.academia.edu/18748505/Pengertian_sarana_dan_prasarana_Menurut_Kamus_Besar_Bahasa_Indonesia), diakses pada tanggal 8 Desember 2018 pukul 11.51 WIB.

Sunarno. 2002. “Tinjauan Yuridis Kritis Terhadap Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan” <http://www.umy.ac.id/hukum/download/Agraria%201.PDF>, diakses pada tanggal 7 Desember 2018 pukul 09.00 WIB.

Syafruddin Kalo. 2004. “Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum” <http://library.usu.ac.id/download/fh/syafruddin11.pdf>. diakses pada tanggal 7 Desember 2018 pukul 09.15 WIB.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan dengan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa.

## **Wawancara**

Wawancara dengan Bagian Pengadaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, Komplek THR Jalan Brigjen Katamso, Keparakan, Mergangsan, Kota Yogyakarta, 18 Februari 2019.

# **LAMPIRAN**

Adapun pembayaran tanah pengganti tanah kas desa Girisekar ini mencapai 3,3 miliar rupiah untuk 17 bidang tanah. Besaran harga tanah yang diberikan mengacu pada peraturan yang berlaku dengan tahapan/ proses pengadaan tanah, yaitu sosialisasi, penawaran, survei lokasi, negoisasi dan kesepakatan.



sehingga anggaran yang dibutuhkan lebih ringan.

Selama ini keberdaan JJLS sangat diharapkan oleh warga masyarakat. Jalan penghubung antara wilayah Bantul, Gunungkidul dan Wonogiri tersebut diyakni akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

“Masyarakat menunggu JJLS selesai dibangun. Warga sangat mendukung JJLS,” ungkapnya. (has)

Gunawan berharap, Pembangunan JJLS bisa segera direalisasikan dengan tujuan agar keberadaannya bisa memberikan dampak yang positif bagi warga sekitar, khususnya yang berada di wilayah Panggang.

*“Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya kapan pembangunan, apalagi proses pembayaran tanah sudah selesai dilakukan,” ujarnya.*

Salah seorang warga Dusun Kadisobo, Girimulyo, Maryoto mengakui sudah membongkar rumah terdampak JJLS sejak dua bulan yang lalu. Pengosongan dilakukan karena tidak memiliki hak atas tanah tersebut.

*“Kan sudah dibeli pemerintah. Jadi saua bonakar kemudian diwasana di*

Kepala Desa Girimulyo Sunu Raharjo mengatakan, di wilayahnya terdapat 159 bidang yang terkena dampak pembangunan JJLS. Dari jumlah tersebut terdiri dari ladang, perkarangan hingga bangunan rumah milik warga.

*“Semua sudah beres karena ganti rugi lahan sudah dilakukan,” katanya, Selasa (31/10/2017).*

Dia mengatakan, upaya pembebasan lahan berlangsung lancar dan tidak ada kendala. Setelah pembayaran ganti rugi, warga pun dengan suka rela membongkar rumah-rumah yang terkena dampak untuk pembangunan JJLS.

*“Untuk rumah yang dibongkar itu ada sekitar 30 unit. Sekarang ini, para nemiliki inaa telah pindah ke lokasi*

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama : **Kamil Mahfudin Kosa**  
NIM : **20140610215**  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul : **PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH OLEH  
PEMERINTAH UNTUK JALAN JALUR LINTAS  
SELATAN DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL**  
Dosen Pembimbing : **Beni Hidayat, S.H., M.Hum.**

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar 19%.

Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ka. Ur. Pengelolaan



Laela Niswatin, S.I.Pust

Yogyakarta, 04-03-2019  
yang melaksanakan pengecekan



Ikram Al Zein, S.Kom.I